



UNIVERSITAS INDONESIA

PARTISIPASI LSM DALAM PROSES PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TESIS

FIRSTY HUSBANI  
0706187294

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK  
MAGISTER MANAJEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL

Jakarta

Juli 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

PARTISIPASI LSM DALAM PROSES PENYUSUNAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master

FIRSTY HUSBANI  
0706187294

FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK  
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
MAGISTER MANAJEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL

Jakarta

Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

Telah saya nyatakan dengan benar.



Nama: Firsty Husbani

NPM:0706187294

Tanda Tangan: \_\_\_\_\_

Tanggal: 8 Juli 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Firsty Husbani  
NPM : 0706187294  
Program Studi : Sosiologi  
Judul Tesis : Partisipasi LSM dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Panitia Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Rosa Diniari (  )

Sekretaris Sidang : Lidya Triana, M.Si (  )

Pembimbing : Drs. Ganda Upaya, MA (  )

Penguji Ahli : Francisia SSE Seda, Ph.D (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, hanya atas berkahNya, RahmahNya, serta seizinNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master pada program studi Magister Manajemen Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Apa yang telah tercapai ini, tidak bisa dilepaskan dari bantuan dan peran berbagai pihak. Kesempatan ini merupakan saat yang tepat bagi saya untuk menyampaikan penghargaan, ungkapan terimakasih yang tidak terhingga pada pihak-pihak sebagai berikut:

- (1) Pembimbing tesis saya, Bapak Ganda Upaya, MA. Saya sangat menghargai kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing tesis saya. Saya juga sangat menghargai atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Bapak curahkan untuk penulisan tesis ini;
- (2) Para narasumber pada penelitian ini, teman-teman dari Koalisi MP3, dari Koalisi KIP, dari DPR, dari pemerintahan; yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sangat terbantu dengan informasi dan diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Terima kasih atas waktu dan informasi yang telah saya terima, yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Hans Antlov, kolega dan mantan supervisor di Ford Foundation. Dukungan buku-buku, pemikiran, dan diskusi-diskusinya serta kritik-kritik yang telah ‘menyadarkan’ saya;
- (4) Sahabat-sahabat, yang telah memberikan pengertian dan dukungan selama saya menjalani masa-masa perkuliahan sampai penyusunan tesis, terutama pada tim DRSP (Sarah, Elke, Andrew, Gordon, Ririn, Yuli, Suhirman, pak Arya, dll); input-input dan kontribusi pemikiran maupun buku-buku sangat membantu saya;
- (5) Sahabat-sahabat sesama MMPS 2007, meski kita tim kecil, tapi support dan dukungan antar kita sangatlah besar. Begitu juga sahabat-sahabat di program Reguler yang sama-sama menjalani masa-masa berat selama penulisan tesis ini; terima atas sharing dan informasi-informasi selama ini;
- (6) Seluruh dosen, yang telah memberikan transfer ilmu dan pengetahuan; beserta dukungan penting dari tim sekretariat, baik di Salemba maupun di Depok;

(7) Orang-orang rumah yang tercinta: Raakan, Rayyan, dan yang paling setia menunggu dan menjemput setiap selesai kuliah (bahkan pernah harus menunggu hingga tengah malam). Mereka adalah orang-orang sangat mentolerir kegiatan perkuliahan yang menyita waktu; termasuk menyita waktu yang semestinya untuk di rumah. Mata kanak-kanak rayyan pernah mengungkapkannya. Suatu hari, rayyan melihat daftar Dr. (doctor); list semua dosen. Rayyan tahu kalau Dr itu dokter. Kanak-kanaknya mendorong pertanyaan “ibu kok punya dokter banyak sekali?” kemudian saya menjawab bahwa itu adalah para guru yang mengajar. Kemudian saya menjelaskan juga bahwa bila telah menyelesaikan sekolah di SD akan melanjutkan sekolah ke SMP, kemudia lanjut ke SMA, setelah itu ke S1, setelah itu Ke S2, dan terakhir ke S3. Mendengar penjelasan itu, rayyan bertanya lagi, “ibu sekarang S2 ya?” Saya jawab: “iya”. Komentar spontan yang diungkap rayyan adalah “*wah*, berarti nanti ibu akan sekolah ke S3, lalu, kapan *dong* waktu ibu untuk main *ama dede?*” *hugs*, ungkapan polos seorang anak yang merasa tercuri waktunya, yang semestinya tercurah untuk dia. Semoga apa yang telah terlewat bisa ditebus dimasa mendatang. Semoga apa yang telah “terkorbankan” memperoleh imbalan yang seimbang. Terima kasih untuk pengertiannya ya *Nak*;

(8) Mama, babe, serta keluarga besar Bandung dan Sekayu, yang selalu memberikan doa maupun dukungan moril sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.

Akhir kata, hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat; baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi kalangan LSM.

Bekasi, Juli 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firsty Husbani

NPM : 0706187294

Program Studi : Magister Manajemen Pembangunan Sosial

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial Politik

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Partisipasi LSM dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal: 8 Juli 2009

Yang menyatakan

(Firsty Husbani)

## ABSTRAK

Nama : Firsty Husbani

Program Studi : Magister Manajemen Pembangunan Sosial

Judul : Partisipasi LSM dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

Kata kunci:

Partisipasi, demokratisasi, ruang publik, *civil society*, kebijakan publik, partisipasi politik

---

---

## ABSTRACT

Name : Firsty Husbani

Study Program : Magister Management of Social Development

Title : NGO Participation on the Procedure for Law Making Process

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs.

Key Words:

Participation, democracy, public sphere, civil society, public policy, political participation



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR MATRIKS .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Signifikansi Penelitian .....	7
1.5 Delimitasi dan Limitasi Penelitian .....	8
1.6 Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	8
1.7 Teknik Penulisan Laporan .....	9
2. PARTISIPASI PUBLIK DALAM RUANG PUBLIK UNTUK PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK .....	11
2.1 Konteks Penelitian .....	12
2.2 Konsep Ruang Publik .....	13
2.3 Konsep Partisipasi Politik .....	17
2.4 Konsep Partisipasi Publik .....	18
2.5 Konsep Kebijakan Publik .....	21
2.6 Konsep <i>Civil Society</i> .....	23

3. Metodologi Penelitian .....	26
3.1 Pengantar .....	26
3.2 Prosedur Pengumpulan Data .....	28
3.3 Model Analisis Data .....	31
3.4 Metode Verifikasi Data .....	34
4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) DAN RUANG PUBLIK DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK .....	35
4.1 Proses Penyusunan Perundang-undangan.....	37
a. RUU Keterbukaan Informasi Publik .....	39
b. RUU Pelayanan Publik .....	42
4.2 Mekanisme Partisipasi dan Penyebarluasan Informasi pada Publik	45
a. RUU Keterbukaan Informasi Publik .....	50
b. RUU Pelayanan Publik .....	53
4.3 Ruang Publik dan Akuntabilitas Politik .....	58
5. PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK .....	62
5.1 Civil Society dan Ruang Publik .....	65
a. Koalisi KIP dan RUU KIP .....	65
b. Koalisi MP3 dan RUU PP .....	73
5.2 Pilihan Strategi yang dilakukan Civil Society dalam mempengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	82
a. Koalisi KIP untuk RUU KIP .....	83
b. Koalisi MP3 untuk RUU PP .....	87
5.3 Peran Civil Society dalam Kerangka Governance untuk Proses Pembuatan Kebijakan Publik .....	91
6. KESIMPULAN DAN SARAN .....	95
6.1 Kesimpulan .....	95
6.2 Saran .....	101
DAFTAR REFERENSI .....	105

## DAFTAR MATRIKS

MATRIKS 1: JADWAL PENELITIAN .....	9
MATRIKS 2: PEROLEHAN DATA .....	30
MATRIKS 3: ANGGOTA KOALISI KIP .....	64
MATRIKS 4: LIST ORGANISASI YANG BERGABUNG DI KOALISI MP3 DAN KOALISI KIP .....	64
MATRIKS 5: TABEL BENTUK RUANG PUBLIK YANG DIFASILITASI KOALISI KIP .....	66
MATRIKS 6: TABEL BENTUK RUANG PUBLIK YANG DIFASILITASI KOALISI MP3 .....	74
MATRIKS 7: PROSES PARTISIPASI LSM .....	97



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1: KERANGKA KONSEPTUAL .....	11
GAMBAR 2: NARASUMBER PENELITIAN .....	29
GAMBAR 3: MODEL ANALISIS DATA .....	32
GAMBAR 4: PROSES PEMBAHASAN RUU DI DPR .....	39
GAMBAR 5: ANGGOTA KOALISI MP3 .....	63
GAMBAR 6: HASIL ANALISA SWOT TERHADAP RUANG PUBLIK YANG DISEDIAKAN DPR .....	96
GAMBAR 7: HASIL ANALISA SWOT TERHADAP RUANG PUBLIK YANG DIFASILITASI LSM .....	99
GAMBAR 8: TIGA KRITERIA RUANG PUBLIK .....	100
GAMBAR 9: MODEL CONSTITUENT BUILDING .....	102
GAMBAR 10: MODEL PARTISIPASI .....	104

## DAFTAR LAMPIRAN

### A. Profil Koalisi:

1. Koalisi KIP .....	109
2. Koalisi MP3 .....	112

### B. Pedoman Wawancara

1. Untuk LSM .....	116
2. Untuk DPR .....	117

### C. Transkrip Wawancara:

1. Transkrip Wawancara dengan Prayekti Muharjanti dan Henry Subagia (ICEL/Indonesian Center for Environmental Law) .....	118
2. Transkrip Wawancara dengan Rachmat Budiaji (Sekretariat Komisi 2 DPR RI) .....	125
3. Transkrip Wawancara dengan Sulastio (IPC) .....	131
4. Transkrip Wawancara dengan Ajeng Kesumaningrum (Yappika) .....	135
5. Transkrip Wawancara dengan Cerdas Kaban (Deputy Menteri PAN) ...	141
6. Transkrip Wawancara dengan Saifullah Maksum (PKB) .....	145
7. Transkrip Wawancara dengan Agus Sudibyo (Yayasan SET) .....	150
8. Transkrip Wawancara dengan A. Patra M. Zen (YLBHI) .....	155
9. Transkrip Wawancara dengan Suprawoto, Kepala Badan Informasi Publik, Deperteman Komunikasi dan Informatika .....	161
10. Transkrip Wawancara dengan Eddy Mihati, Anggota Fraksi PDI-P DPR RI .....	164

## DAFTAR SINGKATAN



AJI	: Aliansi Jurnalis Independen
AMPI	: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
Ampres	: Amanat Presiden
ATVLI	: Asosiasi Televisi Lokal Indonesia
Baleg	: Badan Legislasi
Bamus	: Badan Musyawarah
BKSAP	: Badan Kerjasama Antar Parlemen
BK	: Badan Kehormatan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BURT	: Badan Urusan Rumah Tangga
CETRO	: Center for Electoral Reform
CIBA	: Center for Indonesian Budget Advocacy
CS	: Civil Society
CSO	: Civil Society Organization
Depkominfo	: Departemen Komunikasi dan Informasi
DephukHAM	: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DIM	: Daftar Isian Masalah
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FITRA	: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
FOIA	: Freedom of Information Act
FPPM	: Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat
F-PDIP	: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
F-PKB	: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

GAPRI	: Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia
HUMA	: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
ICRP	: Indonesian Conference on Religion and Peace
ICW	: Indonesian Corruption Watch
IICT	: Indonesian Institute for Conflict Transformation
IMLPC	: Indonesia Media Law and Policy Center
IPW	: Indonesian Procurement Watch
ISAI	: Institut Studi Arus Informasi
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik (nama Undang-undang)
KIP	: Kebebasan Informasi Publik (nama koalisi)
KMIP	: Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KKP	: Koalisi Kebijakan Partisipatif
KPI	: Koalisi Perempuan Indonesia
KPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
KRHN	: Komite Reformasi Hukum Nasional
KRUHA	: Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
Kunker	: Kunjungan Kerja
KUKAIP	: Koalisi Untuk Kebebasan dan Akses Informasi Publik
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LeIP	: Lembaga Independensi Peradilan
LKPSM	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
LPDS	: Lembaga Pers Doktor Sutomo
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LSPP	: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
Meneg PAN	: Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara



MP3	: Masyarakat Peduli Pelayanan Publik
MPPI	: Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia
MTI	: Masyarakat Transparansi Indonesia
Ormas	: Organisasi Masyarakat
Pattiro	: Pusat Telaah dan Informasi Regional
Perpres	: Peraturan Presiden
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
PWI Reformasi	: Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
RUU	: Rancangan Undang-undang
RUU KIP	: Rancangan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
RUU PP	: Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik
SEAPA	: South East Asian Press Alliance
Setneg	: Sekretariat Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Tatib	: Tata Tertib
TI Indonesia	: Transparansi Internasional Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UPC	: Urban Poor Consortium
UNPAD	: Universitas Padjadjaran
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
VAB	: Visi Anak Bangsa
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
Yappika	: Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Indonesia
YLKI	: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
YPSDM	: Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia